

**PENGARUH PENERAPAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI
DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH (DPPKAD)
EKS KARESIDENAN PEKALONGAN PADA TAHUN 2013 – 2017**

Balqis

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) to determine simultaneously the effect of the application of local taxes, regional retribution and revenue sharing funds on financial independence 2) To know partially the effect of tax implementation on regional financial independence 3) To know partially the influence of regional retribution on regional financial independence 4) To know partially the effect of revenue sharing funds on regional financial independence. Data collection method used in this study is documentation. While the data analysis used is classical assumption testing, multiple linear regression analysis, simultaneous significance test (F statistical test), individual parameters significant test (t statistical test) and determination coefficient. The first hypothesis uses simultaneous parameter significance test proving that there is a positive and significant influence on the application of local taxes, regional retribution and revenue sharing on regional financial independence as evidenced by $\text{sig} = 0,000 < 0,05$. The second hypothesis uses the individual parameter significance test proving that there is a positive and significant influence on the application of local taxes on regional financial independence as evidenced by the sig value = $0,000 < 0,05$. The third hypothesis uses an individual parameter significance test proving that there is a positive and insignificant influence on the regional financial independence evidenced by $\text{sig} = 0.224 > 0.05$. The fourth hypothesis uses the individual parameter significance test proving that there is a negative and significant effect on revenue sharing on regional financial independence as evidenced by $\text{sig} = 0.001 < 0.05$.

Keywords: *Application Of Local Taxes, Regional Retribution, Revenue Sharing Funds For Regional Financial Independence*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Karesidenan Pekalongan terdiri dari kota Pekalongan, kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, kota Tegal, kabupaen Tegal, kabupaten Batang dan kabupaten Brebes. Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota eks karesiden Pekalongan

pada tahun 2011 – 2013 mengalami peningkatan, untuk kabupaten Batang pada tahun 2011 sekitar Rp 60.155.029 meningkat menjadi Rp 84.720.050 dan terus meningkat ditahun berikutnya menjadi Rp 139.634.472. Begitu juga ke enam kabupaten/kota lainnya yang juga terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota dengan perolehan terendah dari ke tujuh kabupaten/kota

pada tahun 2011 dan 2012 adalah kabupaten Batang. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu kota Pekalongan sebesar Rp 114.252.439. Hal ini tentunya banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya dalam menggali sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya.

Menurut BPS pada tahun 2010, 2011, dan 2012 menjelaskan bahwa kabupaten termiskin di Karesiden Pekalongan adalah kabupaten Brebes dengan Presentase kemiskinan sebesar 12,4%, selanjutnya kabupaten Pemalang dengan presentase sebesar 19,26%, kabupaten Pekalongan 13,86%, kabupaten Batang 12,4%, kabupaten Tegal 10,75%, kota Tegal 10,04%, sedangkan kota pekalongan sebesar 9,47%. Hal ini mencerminkan masih tergantungnya

pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat atau dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan mandiriya keuangan suatu daerah tersebut. Oleh karena itu fenomena dalam penelitian ini yaitu mengenai kemandirian keuangan daerah eks karesidenan Pekalongan. Pada tabel 1.1 di tas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang besar tidak menjamin tingkat kemiskinan yang rendah pada daerah tersebut. Faktor yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan sistem pajak daerah dan retribusi daerah. Bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 1. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2012

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)			Presentase Penduduk Miskin		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	Kab. Batang	103,6	95,3	882,2	14,67	13,47	12,4
2	Kab. Pekalongan	136,6	125,9	116,5	16,29	15	13,86
3	Kab. Pemalang	251,8	261,2	241,7	19,96	20,68	19,26
4	Kab. Tegal	182,5	161,1	149	13,11	11,54	10,75
5	Kab. Brebes	398,7	394,4	364,9	23,01	22,72	21,12
6	Kota pekalongan	26,4	28,3	26,8	9,37	10,04	9,47
7	Kota Tegal	25,7	25,9	24	10,62	10,81	10,04

Sumber : BPS Pemerintah Kabupaten/Kota

Penelitian yang dilakukan Fadly Nggilu (2016) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variable pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan untuk variable retribusi daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah .

kemudian secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Namun pada penelitian serupa yang dilakukan Habibatul Mukarramah (2017) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2014, baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) eks Karesidenan Pekalongan pada tahun 2013 - 2017”.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis dapat mengambil kesimpulan tentang rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Apakah penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks karsidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017?

Apakah penerapan pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks karsidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017 ?

Apakah retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks karsidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017? Apakah dana bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks karesidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara simultan pengaruh penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks karesidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017.

Untuk mengetahui secara parsial pengaruh penerapan pajak terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks karesidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017.

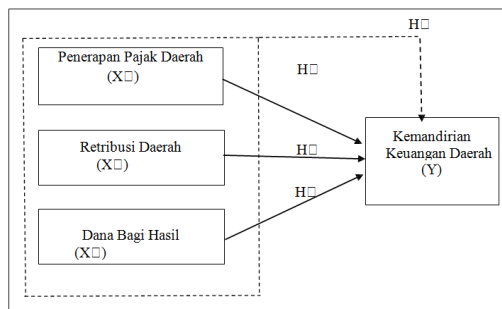
Untuk mengetahui secara parsial pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks karesidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017.

Untuk mengetahui secara parsial pengaruh dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks karesidenan Pekalongan pada tahun 2013 – 2017.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaruh penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di DPPKAD eks karesidenan Pekalongan. Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > : Berpengaruh se: Berpengaruh secara parsial
 —————> : cara simultan

Dari rumusan masalah yang terdapat pada bab I, maka hipotesis penelitian ini adalah :

- H₁ : Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara variabel penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks Karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013 - 2017.
- H₂ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks Karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013 - 2017.
- H₃ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara variabel retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013 - 2017.
- H₄ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara variabel dana bagi hasil terhadap kemandirian ke-

uangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013 – 2017.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan (Kuncoro, 2009:123). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Pekalongan yaitu kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kota Pekalongan, kabupaten Pemalang, kabupaten Tegal, kota Tegal dan kabupaten Brebes. Data yang diperoleh pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) eks karesidenan Pekalongan yang berjumlah 7 kabupaten/kota selama 5 tahun yaitu tahun 2013 - 2017.

Sampel adalah suatu himpunan atau bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro, 2009: 118). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan sampling Jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan jumlah populasi kurang dari 30. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2016: 124). Sampel yang digunakan penelitian ini yaitu 7 Kabupaten/Kota karesidenan Pekalongan yaitu kabupaten Batang, kabupaten Pekalongan, kota Pekalongan, kabupaten Pemalang, kota Tegal, kabupaten Tegal dan kabupaten Brebes dengan data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Data yang diambil untuk dijadikan sampel yaitu 5 tahun dari tahun 2013 – 2017, jadi

jumlah sampel yang akan diteliti 7 kabupaten/kota dikali 5 tahun adalah 35 sampel. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam pengambilan sampel :

Keterangan	Jumlah
Kabupaten/Kota karesidenan Pekalongan	7
Kabupaten/Kota karesidenan Pekalongan yang memiliki data yang lengkap	7
Jumlah data observasi (7 Kabupaten/kota x 5 tahun)	35

3.2. Definisi Konseptual Dan Operasioanl Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen sering juga disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016: 61). Variabel dependen penelitian ini yaitu:

- 1) Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan daerah. (Abdul Halim, 2002: 128).

Variabel Independen

Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016: 161). Variabel independen pada penelitian ini yaitu:

1) Penerapan Pajak Daerah (X_1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo, 2011: 1). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2011: 6).

2) Retribusi Daerah (X_2)

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011: 16).

3) Dana Bagi Hasil (X_3)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dan penetapan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu proses penjabaran variabel penelitian ke dalam subvariabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Operasional variabel pada penelitian ini dijabarkan pada table sebagai berikut:

Table 2. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikat	Pengukuran
Kemandirian Keuangan Daerah (Y) (Halim, 2002: 128)	Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan Pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain.	Rumus yang digunakan adalah: <i>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</i> = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
Perencanaan Pajak Daerah (X ₁) (Mardiasmo, 2011: 6)	Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.	Variabel Penerapan Pajak Daerah diukur dengan rumus sebagai berikut: <i>Rasio Pajak Daerah</i> = $\frac{\text{Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Retribusi Daerah (X ₂) (Mardiasmo, 2011: 15)	Pungutan Daerah Sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Variabel Retribusi Daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: <i>Rasio Retribusi Daerah</i> = $\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Bagi Hasil (X ₃) (UU No. 33 tahun 2004)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Variabel Dana Bagi Hasil dapat hitung menggunakan rumus sebagai berikut: <i>Rasio Dana Bagi hasil</i> = $\frac{\text{Dana Bagi Hasil}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan yaitu Realisasi APBD di masing – masing kabupaten/kota eks Karesidenan

Pekalongan yang didapatkan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Jawa Tengah pada tahun 2013 – 2017.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, dan data yang tidak langsung diperoleh dari subjek penulisannya. Data ini biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan semua data sekunder yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil dan rasio kemandirian keuangan daerah yang di peroleh dari Dinas Pendapatan, Pe.4. *Analisis Data dan Uji Hipotesis*

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Model regresi yang memenuhi asumsi klasik adalah asumsi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Model regresi yang baik mencakup itu semua.

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas yaitu menguji apakah dalam model regresi variabel terikat (variabel dependen) dan variabel bebas (variable independen) keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model regresi tersebut harus memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Apabila model regresi tersebut memenuhi asumsi maka jika data tersebut menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti kolmogorov smirnov. Uji Kolmogorov smirnov ini dilakukan untuk

mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Jadi uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa kriteria Kolmogorov smirnov yaitu:

Jika signifikansi di bawah 0,05 berarti tidak normal, jika signifikansi di atas 0,05 maka normal.

Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji tidak normal, jika di atas 0,05 berarti data tersebut normal.

Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel terikat (variabel dependen). Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi diantara variabel. Apabila variabel bebas/independen saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel orthogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Uji Autokorelasi

Masalah autokorelasi merupakan masalah linier yang menunjukkan adanya suatu korelasi antar anggota observasi yang diurutkan menurut waktu. Autokorelasi timbul karena observasi yang terus menerus beruntutan sepanjang waktu saling terkait satu sama lain. Masalah tersebut biasanya muncul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Apabila kita mengambil data dengan menggunakan observasi secara runtut masalah ini dapat dikatakan sering kali terjadi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan uji

Durbin Watson (DW Test). Uji *Durbin Watson (DW Test)* dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson statistic (DW – stat) dari hasil regresi dengan nilai dari Durbin Watson (DW Tabel). Pengujian yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Autokorelasi Durbin Watson (DW test)

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	No Decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif, atau negative	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi variance dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu heteroskedastisitasnya tidak terjadi, hal tersebut dapat dideteksi dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang teratur pada grafik scatterplot serta titik – titik menyebar di atas dan di sumbu Y di bawah angka 0 (nol).

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menguji variabel bebas (variabel independen) berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (variabel dependen). persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

\hat{Y} : Kemandirian keuangan daerah
 A : Konstanta
 $b_{1,2,3}$: Koefisien regresi
 X_1 : Penerapan Pajak Daerah

X_2 : Retribusi Daerah
 X_3 : Dana Bagi Hasil
 E : epsilon (kesalahan pengganggu/disturbance error's)

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Hasil (X_3) yang dimasukkan dalam metode, mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan Daerah (Y). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi F statistik $< 0,05$, maka Hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi F statistik $> 0,05$, maka Hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

(X_3) secara individual dalam menerangkan variabel–variabel dependen kemandirian keuangan daerah (Y). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut\

Jika nilai signifikansi t statistik $< 0,05$, maka Hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi t statistik $> 0,05$, maka Hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat atau variabel dependen (Kuncoro, 2009: 240). Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi berganda. Jika R^2 mendekati angka 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Sebaliknya jika R^2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL ANALISIS DATA DAN UJI HIPOTESIS

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif yang merupakan analisis perhitungan terhadap angka-angka dan perbandingan untuk menarik kesimpulan. Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu

sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas yaitu menguji apakah dalam model regresi variabel terikat (variabel dependen) dan variabel bebas (variable independen) keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Model regresi tersebut harus memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Apabila model regresi tersebut memenuhi asumsi maka jika data tersebut menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti *kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorov smirnov* ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Jadi uji *kolmogorov smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	35
Normal Parameters, b Mean	,0000000
Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences	5,76501715
Positive	,130
Negative	,130
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)	-,072
	,767
	,599

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi *kolmogorov smirnov* dengan *unstandardized residual* diperoleh nilai sebesar 0,599. Perbandingan antara *probability* dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai *probability* lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini normal.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0.10 sama dengan tingkat kolonieritas 0.95. Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Col linearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pajak Daerah	,499	2,005
Retribusi Daerah	,496	2,014
Dana Bagi Hasil	,903	1,107

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Dari hasil perhitungan uji asumsi klasik pada bagian pada penelitian ini terlihat untuk tiga variabel independen, angka VIF yaitu untuk variable pajak daerah sebesar 2,005; untuk variable retribusi daerah sebesar 2,014 dan untuk variable dana bagi hasil sebesar 1,107 yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Masalah autokorelasi merupakan masalah linier yang menunjukkan adanya suatu korelasi antar anggota

observasi yang diurutkan menurut waktu. Autokorelasi timbul karena observasi yang terus menerus beruntutan sepanjang waktu saling terkait satu sama lain. Masalah tersebut biasanya muncul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Apabila kita mengambil data dengan menggunakan observasi secara runtut masalah ini dapat dikatakan sering kali terjadi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan uji *Durbin Watson (DW Test)*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, Positif atau negatif	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali (2011:111)

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini:

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Durbin- Watson
1	2,209 ^a

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

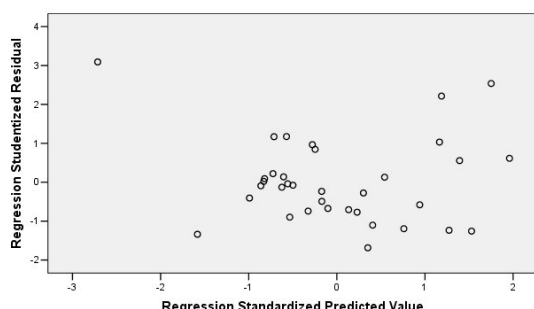
b. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Dari hasil uji Durbin-Watson dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil 2,209. Jika jumlah variabel bebas sebanyak 3 dan tingkat signifikansi 0,05 atau $\alpha = 5\%$ dan $n = 35$ diketahui $du = 1,6528$ sedangkan $4 - du (4 - 1,6528) = 2,3472$. Sehingga hasil perhitungan uji durbin watson terletak diantara $1,6528 - 2,3472$ yang berarti model regresi tidak ada masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi variance dan residual dari satu pengamatan ke pengamat-

tan yang lain. Model regresi yang baik yaitu heteroskedastisitasnya tidak terjadi, hal tersebut dapat dideteksi dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu yang teratur pada grafik scatterplot serta titik – titik menyebar di atas dan di sumbu Y di bawah angka 0 (nol). Berikut ini adalah hasil uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas diketahui bahwa tidak ada pola tertentu yang teratur pada grafik scatterplot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menguji variabel bebas (variabel independen) berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (variabel dependen). Di katakan linier karena setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant) Pajak	13,895	3,641		3,816	,001
	Daerah Retribusi	4,480	,946	,632	4,738	,000
	Daerah	2,337	1,883	,166	1,241	,224
	Dana Bagi Hasil	-,518	,149	-,346	-3,485	,001

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi yaitu $\hat{Y} = 13,895 + 4,480 X_1 + 2,337 X_2 - 0,518 X_3 + e$. Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas dapat diambil suatu analisis bahwa:

Konstanta sebesar 13,895 artinya jika tidak ada variabel penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil maka kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 13,895 %.

Koefisien regresi untuk variabel penerapan pajak daerah sebesar 4,480 dan bertanda positif artinya jika penerapan pajak daerah

mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,238%.

Koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah sebesar 2,337 dan bertanda positif artinya jika retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kemandirian keuangan daerah sebesar 2.337 %.

Koefisien regresi untuk variabel dana bagi hasil sebesar 0,518 dan bertanda negatif artinya jika

dana bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 1 % sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan penurunan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,518 %.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

dimasukkan dalam metode, mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen yaitu

Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Jika nilai signifikansi F statistik < 0,05, maka Hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi F statistik > 0,05, maka Hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa suatu variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji signifikan simultan (uji statistik F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2970,206	3	990,069	27,161	,000a
	Residual	1130,004	31	36,452		
	Total	4100,210	34			

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Berdasarkan hasil uji F diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu “Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara variabel penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks Karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013 - 2017” dapat diterima kebenarannya.

4.4. Pengujian Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

satu variabel independen Penerapan Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Dana Bagi Hasil (X_3) secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen kemandirian keuangan daerah (Y). Pengujian atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria jika nilai signifikansi t statistik < 0,05, maka Hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen dan jika nilai signifikansi t statistik > 0,05, maka Hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	13,895	3,641		,001
	Pajak Daerah	4,480	,946	,632	,000
	Retribusi Daerah	2,337	1,883	,166	,224
	Dana Bagi Hasil	-,518	,149	-,346	,001

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah

Dari perhitungan uji signifikansi parameter individual pajak daerah terhadap kemandirian daerah dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, dengan demikian hipotesis kedua yaitu “Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks Karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013 - 2017” dapat diterima kebenarannya.

Dari perhitungan uji signifikansi parameter individual retribusi daerah terhadap kemandirian daerah dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,224 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian daerah, dengan demikian hipotesis ketiga yaitu “Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara variabel retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013 - 2017” tidak dapat diterima kebenarannya.

Dari perhitungan uji signifikansi parameter individual dana bagi hasil terhadap kemandirian daerah dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai $\text{sig} = 0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, dengan demikian hipotesis keempat yaitu “Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara variabel dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013 - 2017” dapat diterima kebenarannya.

Koefisien Determinasi (R Square)

Uji R Square yaitu suatu uji untuk mengukur kemampuan variabel bebas dalam menerapkan variabel tidak bebas. Dimana R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar R^2 (mendekati 1), maka variabel bebas semakin dekat hubungannya dengan variabel tidak bebas, dengan kata lain model tersebut dianggap baik. Koefisien determinasi mempunyai suatu besaran yang digunakan untuk mengukur garis kebaikan (*goodness of fit*) secara verbal, untuk ukuran proporsi atau prosentase total variabel dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi.

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (*R Square*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,851 ^a	,724	,698	6,03753

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Besarnya pengaruh dari variabel penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara terhadap

kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks Karesidenan Pekalongan

(DPPKAD) pada tahun 2013–2017 adalah sebesar 69,8 % dan selebihnya yaitu sebesar 30,2 % dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah dapat diterima kebenarannya, yang dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,000 < 0,05$.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dapat diterima kebenarannya, yang dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,000 < 0,05$.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan retribusi terhadap kemandirian keuangan daerah tidak dapat diterima kebenarannya, yang dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,224 > 0,05$. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah dapat diterima kebenarannya, yang dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,001 < 0,05$.

Besarnya pengaruh dari variabel penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks Karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 69,8 % dan selebihnya yaitu sebesar 30,2 % dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah :

Pemerintah daerah harus lebih fokus pada upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi dan sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah. Dengan meningkatnya kemandirian keuangan, otomatis tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

Pemerintah Daerah sebaiknya terus mengupayakan untuk bisa menarik pajak semaksimal mungkin untuk pembangunan wilayah daerah. Untuk itu perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Selain itu, pemerintah juga harus terus berupaya mengurangi transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat sebagai wujud kemandirian daerah dalam membiayai belanjanya dan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Bagi pemerintah kabupaten dan kota di eks Karesidenan Pekalongan, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri. Semakin meningkat penerimaan retribusi daerah tentunya akan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Dana Bagi Hasil (DBH) bersifat block grant, artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*, (daerah penghasil). Oleh karena itu pemerintah daerah eks Karesidenan

Pekalongan sebaiknya menggunakan dana bagi hasil untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Penelitian ini hanya menunjukkan besarnya pengaruh penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara terhadap kemandirian keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah eks Karesidenan Pekalongan (DPPKAD) pada tahun 2013–2017 adalah sebesar 69,8% untuk itu bagi penelitian mendatang

diharapkan memasukkan atau menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kemandirian daerah ataupun memasukan variabel intervening sehingga dapat mengetahui faktor apa yang dapat memperkuat kemandirian daerah misalnya tingkat ekonomi.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama dengan penelitian ini sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015, 30 Maret. Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011– 2013. Online. [https://jateng.bps.go.id/statictable/2015/02/09/943/pendapatan-asli-daerah-menurut-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-tahun-anggaran-2011---2013-ribu-
rupiah-.html](https://jateng.bps.go.id/statictable/2015/02/09/943/pendapatan-asli-daerah-menurut-kabupaten-kota-se-jawa-tengah-tahun-anggaran-2011---2013-ribu-rupiah-.html) (diakses 18 April 2018).
- Burton, Richard dan Wirawan B Ilyas. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Cornelin G, Kamagi, Jullie J, Tressje Runtu, 2016. *Analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara (periode 2011-2015)*. Jurnal Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 16, No 04 (2016).
- Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 16, No 04 (2016).
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi Pertama. Salemba Empat: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. edisi II, ANDI, Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, edisi IV, ANDI, Yogyakarta.
- _____. 2009. *Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta.
- _____. 2011. *Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta.
- Meiliana. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Terhadap*

- Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung*. Master Thesis. Universitas Lampung.
- Mukarramah, Habibatul. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2014*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Negri Pesona. 2016. Daftar Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah. Online. <http://www.negeripesona.com/2016/02/daftar-kabupaten-termiskin-di-jawa.html> (diakses 4 April 2018).
- Setianegara, Ferdian. 2016. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010 – 2013*. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sriyana, Jaka. 1999. *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Jurnal Ekonomi. JEP Vol 04, No 01 (1999).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta. Suandy, Erli. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Vera Sri Endah Cicilia, Sri Murni, & Daisy M. Engka. (2014). *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Serta kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2009 – 2013*. Jurnal Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia* Edisi 10, buku 1.
- Wenny, CD. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol.2. Pp. 39-51.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2011). *Financial Accounting*. (IFRS edition). The United State of America: John Wiley and Sons, Inc.
- Wiley. 2011. *Research Methods For Business*. Buku 1, edisi 4, Salemba Empat : Jakarta.
- . 2011. *Research Methods For Business*. Buku 2, edisi 4, Salemba Empat : Jakarta